

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



LANDASAN HUKUM

1. LANDASAN IDIIL:

- **UUD 45**
- **UU 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**
- **UU 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

2. LANDASAN OPERASIONAL :

- **RPJPN TAHUN 2005 - 2025**
- **RPJMN TAHUN 2010 - 2014**
- **RENSTRA tahun 2010 - 2014**
- **Kepmenkes 145**

KEBIJAKAN

■ UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
- Pemerintah sbg penanggungjawab PB dgn peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha à **Platform Nasional**
- Merubah paradigma respons mjd **Pengurangan Risiko Bencana**
- Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra bencana, pd saat dan pasca bencana, scr terencana, terpadu, terkoordinasi dan terpadu
- Membangun masyarakat yg tangguh/tahan dlm menghadapi bencana
- **Membangun sistem penanggulangan bencana** yg handal mll kelembagaan yg kuat, pendanaan yg memadai
- Integrasi PB da Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

■ Arahan Presiden

- Bupati/Walikota sbg penanggungjawab utama saat tjd bencana
- Gubernur merapat untuk pendampingan
- Pemerintah mendukung dengan bantuan yang bersifat ekstrim
- Pelibatan TNI dan POLRI
- Penanggulangan secara dini

Nasional

- ▣ **Undang-Undang** No 24 Th 2007 ttg Penanggulangan Bencana
- ▣ **Peraturan Pemerintah**
 1. PP. No. 21/2007 ttg Penyelenggaraan PB
 2. PP. No. 22/2007 ttg Pendanaan & Pengelolaan Bantuan Bencana
 3. PP. No. 23/2007 ttg Peran Lembaga Internasional & Lembaga Asing Non Pemerintah
- ▣ **Peraturan Presiden** No. 8/2008 ttg Pembentukan BNPB
- ▣ **Peraturan Kepala BNPB ...**

KELEMBAGAAN

- UU No 24 tahun 2007 bab III pasal 5 – 6 tentang tanggung jawab dan wewenang
 - Pemerintah & pemerintah daerah mjd penanggung jawab dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana
- UU No. 24 tahun 2007 bab IV pasal 10 – 25 tentang kelembagaan.
 - Pasal 10 – 17 ttg kelembagaan BNPB
 - Pasal 18 – 25 ttg kelembagaan BPBD

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

UU No 24 th 2007 bab VII pasal 36

- ✚ Ditetapkan pemerintah dan pemda
- ✚ Dilakukan mll penyusunan data ttg risiko bencana berdsrkan dokumen resmi berisi program keg penanggulangan bencana
- ✚ Perencanaan penanggulangan bencana meliputi :
 - ü Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
 - ü Pemahaman ttg kerentanan masy
 - ü Analisis kemungkinan dampak bencana
 - ü Pilihan tindr pengurangan risiko bencana
 - ü Penentuan mekanisme kesiapan & penanggulangan dampak bencana
 - ü Alokasi tugas, kewenangan & sumber daya yg tersedia

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

UU No 24 th 2007 bab VII pasal 36

- ✚ Pemerintah dan pemda dlm waktu ttt meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana scr berkala
- ✚ Dlm usaha menyelaraskan keg perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah dan pemda dpt mewajibkan pelaku penanggulangan bencana utk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Integrasi Penanggulangan Bencana dlm Perencanaan Pembangunan

- ▶ PP No 21 tahun 2008 bab II pasal 6 : perencanaan penanggulangan bencana mrpk bagian dr perencanaan pembangunan
- ▶ RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

PENDANAAN

✚ Dana DIPA (APBN/APBD)

- utk mendukung keg rutin & operasional K/L utk keg PRB
- DAK utk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dlm mata anggaran kebencanaan, disesuaikan dgn tk kerawanan dan kemampuan daerah

✚ Dana Kontijensi

- utk penanganan kesiapsiagaan

✚ Dana Siap Pakai (*on call*)

- utk bantuan kemanusiaan (*relief*) pd saat tjd bencana atau pd saat dinyatakan kondisi darurat.
- dana ini juga dpt ada dlm anggaran penanggulangan bencana yg berasal dr APBD yg ditempatkan dlm anggaran BPBD

PENDANAAN

✚ Dana bantuan sosial berpola hibah

- utk pemberian bantuan pd tahap pasca bencana utk rehab rekons dr APBN

✚ Dana bersumber masyarakat

- adl. dana yg dikumpulkan oleh berbagai pihak yg berasal dr masyarakat utk upaya penanggulangan bencana.
- dlm pelaksanaannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengawasi pengumpulan dan penggunaan dana tsb

VISI KEMENTERIAN KESEHATAN

MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

MISI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014

- MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI**
- MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIAANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU, DAN BERKEADILAN**
- MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBERDAYA KESEHATAN**
- MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK**

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2014 diprioritaskan pada ;

“peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui *delapan fokus prioritas*”.

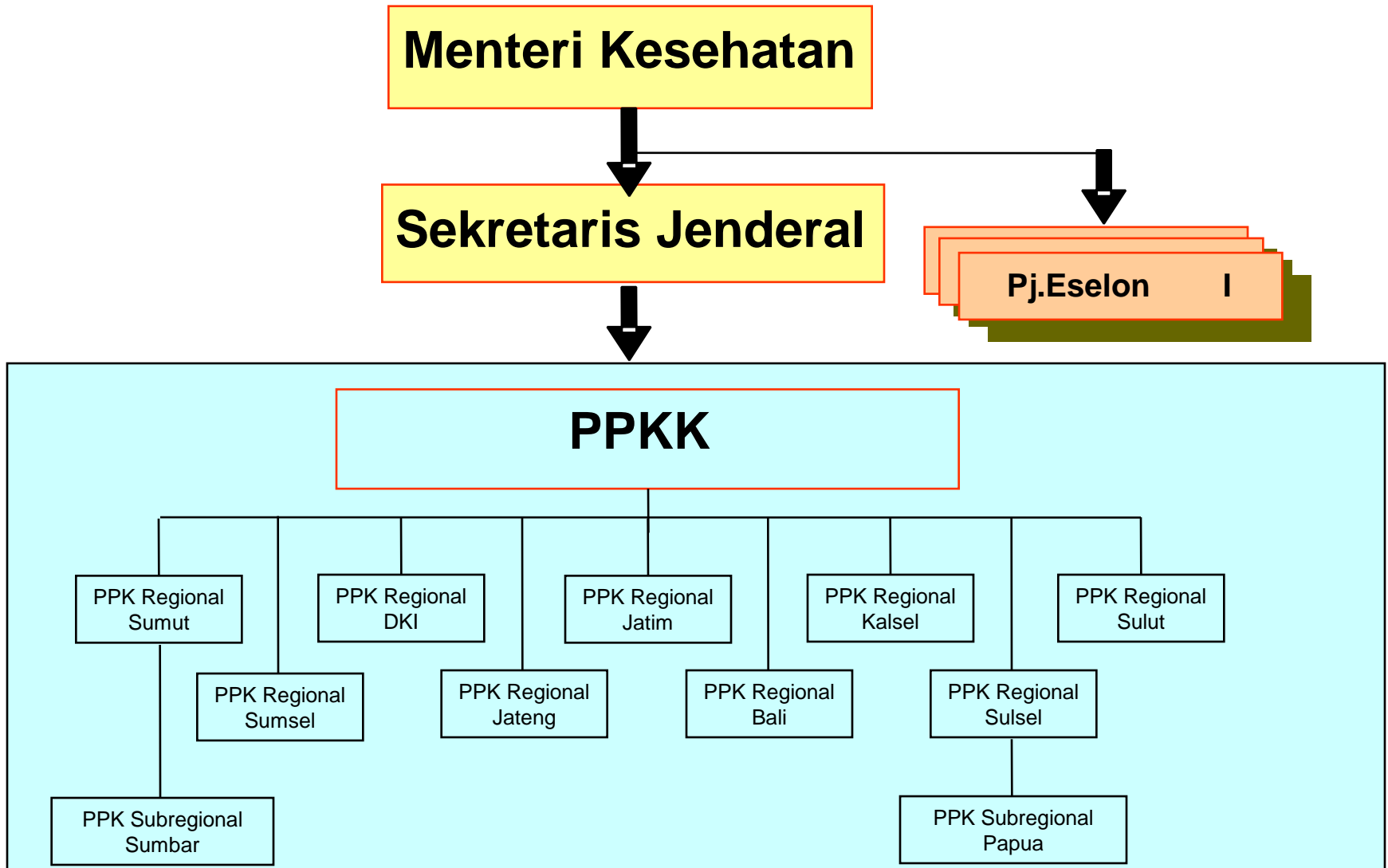
8 Fokus prioritas pembangunan kesehatan 2010-2014 :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan
4. Pengembangan SDM kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, obat, pengawasan obat dan makanan
6. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan

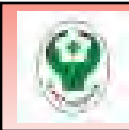
1. Perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat,
2. Pengembangan sarana, prasarana dan peraturan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat,
3. Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung,
4. Keterpaduan pemberdayaan,
5. Evakuasi, perawatan dan pengobatan korban pada daerah bencana,
6. Kemitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat,
7. Kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan
8. Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Struktur organisasi Kementerian Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana

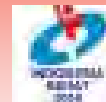


VISI PKK

**“MENURUNNYA RISIKO
KESEHATAN AKIBAT KRISIS
KESEHATAN”**



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



MISI PPKK

- ž Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan
- ž Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan
- ž Meningkatkan kapasitas sumberdaya kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang bermutu dan merata
- ž Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat
- ž Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan

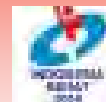


TUJUAN

“Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan “



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



SASARAN STRATEGIS

- A. Meningkatnya kemampuan sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota, melalui :
1. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan
 2. Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan
 3. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan
 4. Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan
 5. Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



SASARAN STRATEGIS

- B.** Meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui :
1. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan
 2. Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih
 3. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan
 4. Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPK Regional dan Sub Regional dengan anggota regional



SASARAN STRATEGIS

- C.** Meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui :
- 1.** Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan
 - 2.** Optimalisasi jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan
 - 3.** Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan.



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



SASARAN STRATEGIS

4. Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan.
5. Tersedianya sistem penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan.
6. Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



KEBIJAKAN

1. Lebih menitikberatkan kepada upaya *sebelum terjadi krisis kesehatan* dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan
2. Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan
3. Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat
4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan
5. Penyediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



STRATEGI

1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan
3. Mendorong peran daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan
4. Mengembangkan jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Sub Regional
6. Mengembangkan sistem informasi krisis kesehatan yang berkualitas



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**





PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS REGIONAL




 Regional Sumut (Berpusat di Medan dengan wilayah kerja Prov. NAD, Sumut, Riau, Kepri dan Sumbar)


 Regional Sumsel (Berpusat di Palembang dengan wilayah kerja Prov. Bengkulu, Sumsel, Jambi dan Babel)

 Regional DKI Jakarta (Berpusat di Jakarta dengan wilayah kerja Prov. Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar dan Kalbar)


 Regional Jateng (Berpusat di Semarang dengan wilayah kerja Prov. Jateng dan DI Yogyakarta)

 Regional Jatim (Berpusat di Surabaya dengan wilayah kerja Prov. Jatim)

 Regional Bali (Berpusat di Denpasar dengan wilayah kerja Prov. Bali, NTB dan NTT)

 Regional Kalsel (Berpusat di Banjarmasin dengan wilayah kerja Prov. Kalsel, Kalteng dan Kaltim)

 Regional Sulut (Berpusat di Manado dengan wilayah kerja Prov. Gorontalo, Sulut dan Maluku)

 Regional Sulsel (Berpusat di Makassar dengan wilayah kerja Prov. Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Maluku, Papua Barat dan Papua)



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



Tugas DAN FUNGSI

- ✓ Menyiapkan dan memobilisasi sumber daya utk mempercepat dan mendekatkan bantuan pelayanan kesehatan
- ✓ Pusat Informasi (media center)
- ✓ Fasilitasi logistik kesehatan (obat, alkes)
- ✓ Menggerakkan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan SDM Kesehatan ke daerah bencana



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**





PERAN PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS REGIONAL:

- a. Pusat Dukungan Pelayanan Kesehatan
- b. Pengendalian Upaya Pelayanan Kesehatan
- c. Pusat Rujukan
- d. Pusat Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



Penyiapan Sarana Kesehatan PPK Regional

- ✓ Obat dan bahan habis pakai
- ✓ Alat kesehatan
- ✓ Alat transportasi (ambulans emergency, Mobil klinik, perahu karet, motor URC, kendaraan operasional R-4 dan R-3)
- ✓ Alat komunikasi (HT, RI G, HP satelit)
- ✓ RS lapangan
- ✓ Alat dan bahan sanitasi (water purifier, PAC, insektisida, dll)
- ✓ Sarana penunjang lain (gen set, tenda lapangan, kantong jenazah dll)
- ✓ Pembangunan gedung sekretariat/media center dan gudang



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



**Implementasi kebijakan
peningkatan keterpaduan
melalui jejaring lintas program,
lintas sektor dan masyarakat
melalui koordinasi**



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



Mengapa kita membutuhkan koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana?

Kelompok lokal

Individual

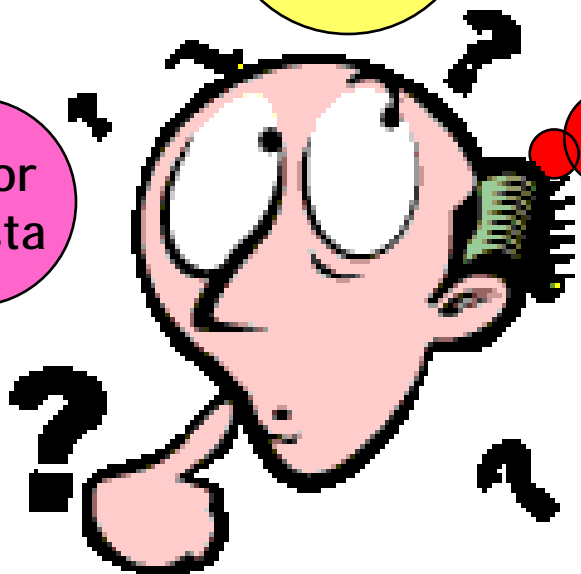
Media

PBB

Inter nasional
LSM/NGO

LSM/
NGO

Sektor swasta



Sudah begitu banyak institusi/organisasi yang terlibat dalam PKK-AB.

Siapa saja?

Apa yang dapat mereka lakukan?

Kapan?

Kemana?

Kenapa?

Bagaimana mengaturnya?

Bagaimana mengaturnya?



PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Tujuan koordinasi

Untuk berbagi dan belajar, mengetahui perkembangan situasi terakhir dan menganalisisnya serta untuk memobilisasi sumber daya yang ada agar bekerja secara efektif



**SUMBER
DAYA YANG
TERSEDIA**

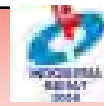
Koordinasi adalah
untuk berbagi bersama

Kerjasama adalah
untuk berbagi dan
bekerja bersama

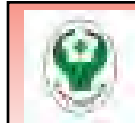
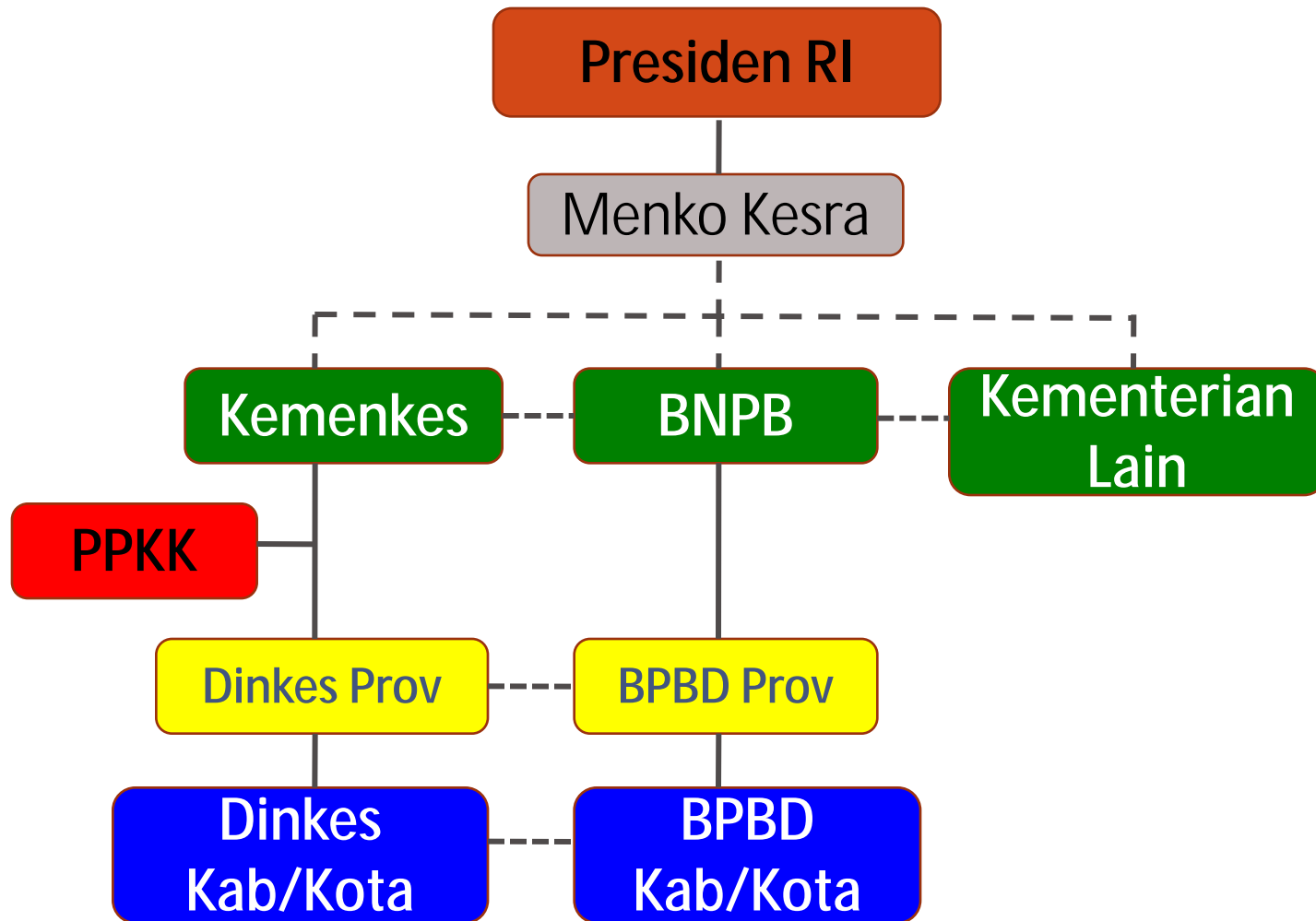
Kolaborasi adalah untuk
berbagi kerja dan
berkontribusi bersama



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



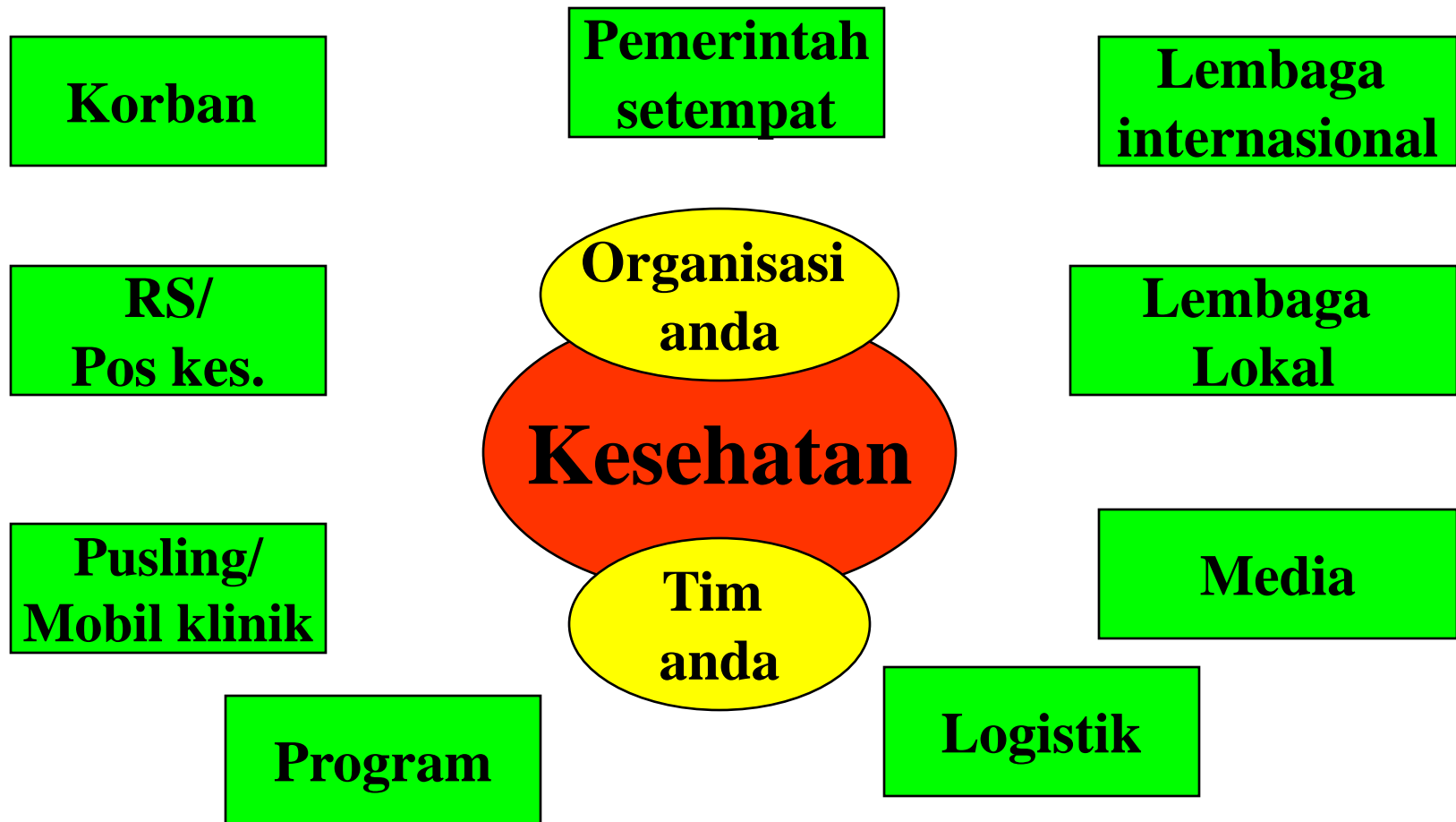
MEKANISME KOORDINASI



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



Hal yang perlu dikoordinasikan



PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Faktor-faktor yang berperan dalam koordinasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

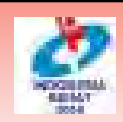
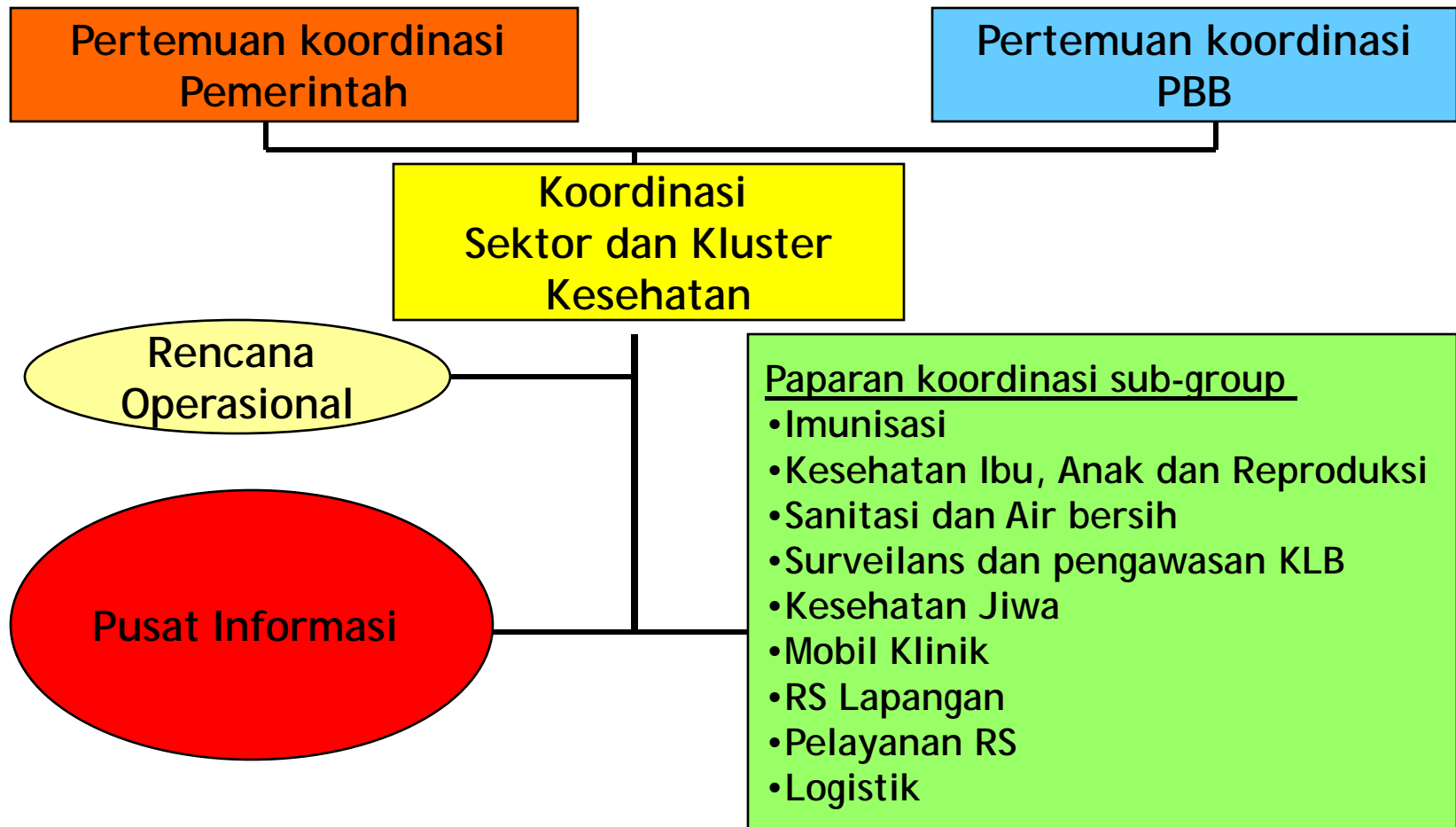
- **Struktur organisasi yang sudah ada**
- **Sistem yang sudah ada**
- **Metode penanganan yang sudah ada**
- **Jenis bencana dan dampaknya**
- **Situasi terakhir**
- **Sumber daya yang tersedia**
- **Aspek politis**



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



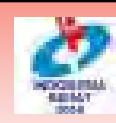
Struktur dan metodologi sektor dan kluster kesehatan di Indonesia



KOORDINASI ANTARA PPKK DENGAN UNIT-UNIT LINTAS SEKTOR

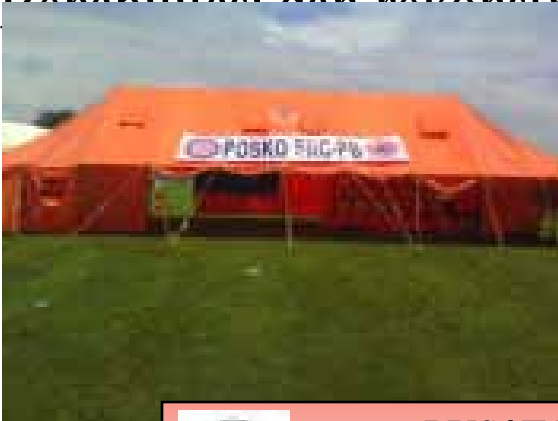


**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ BNPB

- Pelatihan-pelatihan
- Penyusunan pedoman
- Geladi Bencana
- Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
- Mobilisasi tenaga dan logistik kesehatan
- Evaluasi penanggulangan bencana
- Inventarisasi kerusakan fasilitas kesehatan
- Rehabilitasi dan rekonstruksi



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ PUSDOKKES POLRI

- Pelatihan-pelatihan
- Penyusunan pedoman
- Mobilisasi tenaga DVI



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

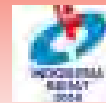


PPKK ↔ PUSKES TNI

- Pelatihan-pelatihan
- Penyusunan pedoman
- Mobilisasi tenaga dan logistik kesehatan
- Rumah Sakit Terapung KRI Soeharso



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ BMKG

- Sistem peringatan/ alarm gempa bumi dan tsunami
- Informasi cuaca dan tinggi gelombang laut



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

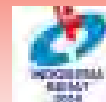


PPKK ↔ KEMENTERIAN PU

- Pemulihan darurat sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan (jalan, jembatan)
- Penyediaan air bersih
- Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ KEMENTERIAN SOSIAL

- Dapur Umum untuk penyediaan makanan di pengungsian
- Informasi data pengungsi
- Mobilisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

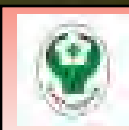


**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ PMI

- Pelatihan-pelatihan
- Penyusunan pedoman
- Geladi Bencana
- Mobilisasi tenaga dan logistik kesehatan
- Tim RS Lapangan



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKK ↔ WHO

- Pelatihan-pelatihan nasional dan internasional (ITC – DRR)
- Penyusunan pedoman
- Pengurangan Resiko Bencana
- Evaluasi Penanggulangan Bencana



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



PPKI ↔ ORGANISASI PROFESI

- Pada prabencana :
 1. Pelatihan-pelatihan bagi petugas yang akan ditugaskan ke daerah bencana (ATLS, ACLS, GELS, SPGDT, Emergency Nursing dan lainnya)
 2. Penyusunan pedoman dan SOP tindakan medis
- Pada saat bencana :

Mobilisasi tenaga kesehatan ke lokasi bencana
- Pada pascabencana :

Pemulihan kesehatan fisik, mental dan psikososial korban maupun pengungsi



**PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kapus PKK : 087877288238

**Telp. 021-5265043, 5210411,
5210420, 5210394**

Fax. 021-5271111, 5210395

SMS GATEWAY: 081385904444

E-mail : ppkdepkes@yahoo.com

Website : www.ppk-depkes.org

terima kasih